



**LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
TAHUN 2016**

**ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET RI
2017**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, Kedeputan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan ini pada intinya memuat tentang pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang direncanakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat khususnya bagi unit kerja dilingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta, Maret 2017
Asisten Deputi
Bidang Hubungan Internasional,

Johar Arifin, S.IP, MPM.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Dari Segi Output

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah menghasilkan 612 (enam ratus dua belas) dokumen rekomendasi, yang terdiri dari 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) rekomendasi kebijakan, 101 (seratus satu) rekomendasi atas permohonan persetujuan prakarsa dan substansi RPUU, dan 133 (seratus tiga puluh tiga) rekomendasi terkait materi sidang kabinet yang keseluruhannya ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dan disusun secara tepat waktu (**capaian 100% kategori sangat baik**), rekomendasi tersebut dihasilkan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi dengan instansi terkait serta menghadiri pertemuan dan konferensi yang diselenggarakan di dalam dan di luar negeri.

b. Dari Segi Anggaran

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah merealisasikan anggaran tahun 2016 sebesar **Rp 774.932.619** yang merupakan **capaian senilai 99,99%** dari pagu anggaran revisi sebesar Rp. 775.000.000. atau senilai 86,10% dari pagu anggaran awal sebesar Rp. 900.000.000.

Dari sisi perencanaan, capaian di atas dapat dikatakan memuaskan karena capaian output rekomendasi sebesar 100% dan serapan anggaran sebesar 99,99%. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa datang, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional ...	1
C. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	7
B. Penetapan Kinerja	8
C. Indikator Kinerja Utama	9
BAB III CAPAIAN KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	11
B. Capaian Kinerja Tahun 2016	11
C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016	12
D. Realisasi Anggaran Tahun 2016	28
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2016	29
B. Langkah-Langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian sasaran kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan atau dalam rangka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Laporan kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Asdep Bidang Hubungan Internasional sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep Bidang Hubungan Internasional, mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional.

Asdep Bidang Hubungan Internasional menyelenggarakan fungsi:

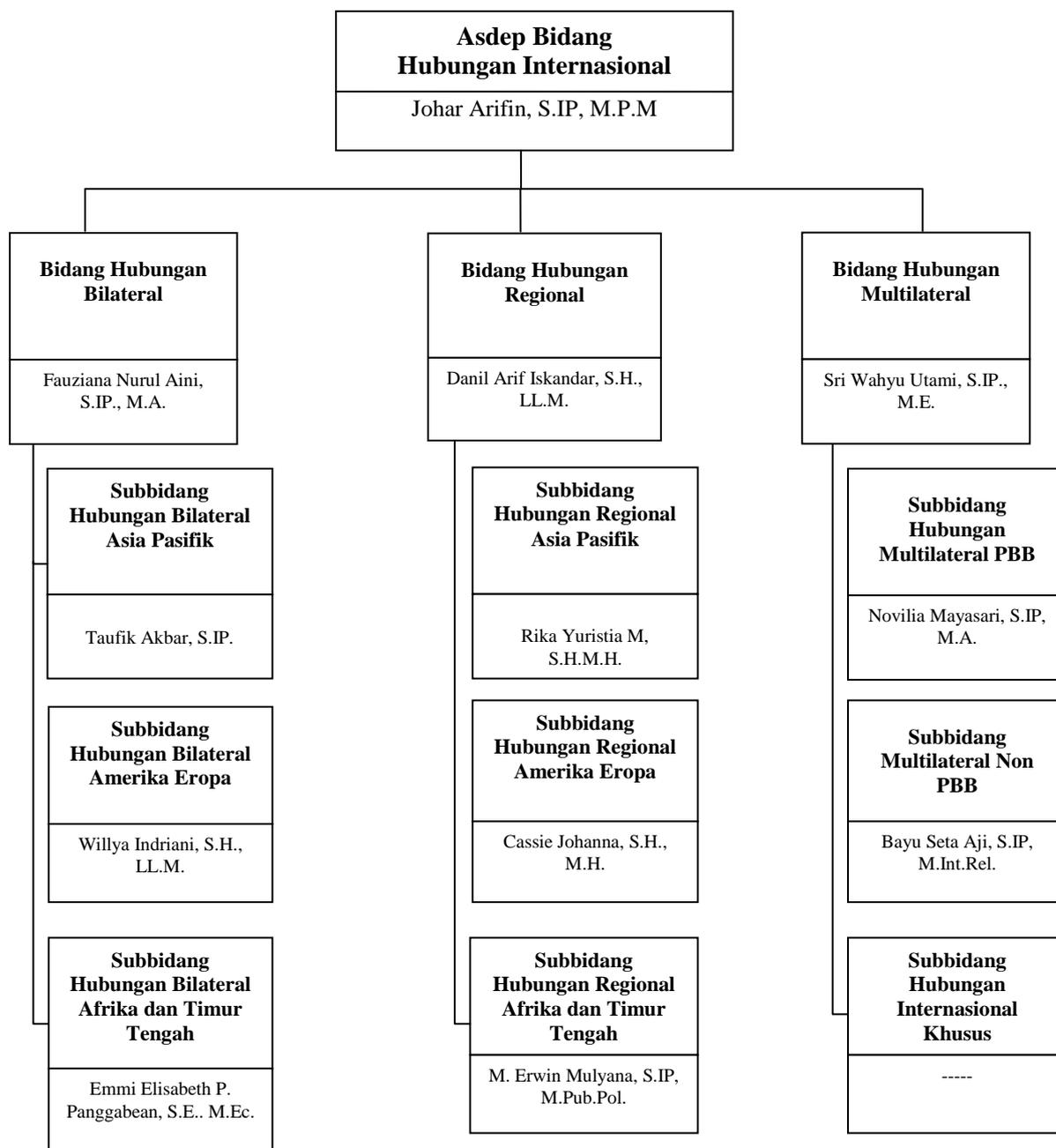
1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Struktur organisasi Asdep Bidang Hubungan Internasional yang didukung oleh 3 (tiga) Bidang dan 9 (sembilan) Subbidang, yaitu :

1. Bidang Hubungan Bilateral, terdiri dari 3 (tiga) Subbidang, yakni: Hubungan Bilateral Asia Pasifik, Hubungan Bilateral Amerika dan Eropa, dan Hubungan Bilateral Afrika dan Timur Tengah.
2. Bidang Hubungan Regional, terdiri dari 3 (tiga) Subbidang, yakni: Hubungan Regional Asia Pasifik, Hubungan Regional Amerika dan Eropa, dan Hubungan Regional Afrika dan Timur Tengah.
3. Bidang Hubungan Multilateral terdiri dari 3 (tiga) Subbidang, yakni: Hubungan Multilateral Perserikatan Bangsa Bangsa, Hubungan Multilateral Non Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Hubungan Internasional Khusus.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 1
Struktur Organisasi Asdep Bidang Hubungan Internasional



Penjabaran mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Asdep Bidang Hubungan Internasional secara rinci tercantum dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet pasal 44-48.

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Asdep Bidang Hubungan Internasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 16 (enam belas) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah SDM Berdasarkan Golongan, Eselon, Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV/c	1	Asdep (Esl. II a)	1	S 2	1	L	1
IV/b	2	Kabid (Esl. III a)	1	S 2	1	L	1
IV/a	1		1	S 2	1	P	1
III/d	1	Kasubid (Esl. IV a)	1	S2	1	P	1
III/c	6		6	S 2	5	L	2
				S 1	1	L	1
III/b	1	Analisis Kebijakan	1	S 2	1	P	1
III/a	4	Analisis Kebijakan	4	S 1	3	P	4

C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Hubungan Internasional menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal). Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Asdep Bidang Hubungan Internasional adalah sebagai berikut:

Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep Bidang Hubungan Internasional adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan Organisasi: (a) komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi; (b) kebijakan organisasi; dan (c) sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Kelemahan Organisasi: (a) peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal; (b) belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh.
3. Potensi Organisasi: (a) komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi; (b) tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan; dan (c) komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.

Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah perkembangan politik, ekonomi, dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap Keasdepan Bidang Hubungan Internasional adalah sebagai berikut:

1. Peluang Organisasi: (a) Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional yang memperkuat landasan Keasdepan Bidang Hubungan Internasional sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat; dan (b) Penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur, dan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik; (c) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah; dan (d) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.
2. Ancaman Organisasi: (a) Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah; (b) *Overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputan substansi.

Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdepan Bidang Hubungan Internasional dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:

1. Aspek Ketatalaksanaan: Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Hubungan Internasional.
2. Aspek Sumber Daya Manusia: Kualitas sebagian SDM masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Hubungan Internasional.
3. Aspek Sarana dan Prasarana: Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Hubungan Internasional

Asdep Bidang Hubungan Internasional terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagai amanah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun dan memuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Pada tahun 2016, Asdep Bidang Hubungan Internasional merencanakan pencapaian 1 (satu) sasaran, yaitu: “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional”.

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh mengenai upaya organisasi berupa penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Program disusun untuk mengoperasionalkan kebijakan dengan orientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan disusun untuk mengoperasionalkan program guna memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Strategi pencapaian dimaksud dijabarkan melalui program dan kegiatan. Pada tahun 2016, Asdep Bidang Hubungan Internasional mempunyai 1 (satu) program dan menetapkan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

Program:

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional.

Kegiatan:

Perumusan dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional.

B. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja Asdep Bidang Hubungan Internasional merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016. Uraian mengenai Penetapan Kinerja Asdep Bidang Hubungan Internasional tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Penetapan Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan. ➤ Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional. • Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang hubungan internasional	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam. 2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu. 3. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam. 4. Persentase rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu. 5. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam. 6. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional secara tepat waktu.	100% 100% 100% 100% 100%

Pagu anggaran Asdep Bidang Hubungan Internasional Tahun 2016 ditetapkan sejumlah Rp. 900.000.000, yang kemudian direvisi jumlah anggaran per kegiatan untuk dialokasikan (diblokir) sebagai tambahan pada anggaran APBN-P Tahun 2016 sejumlah Rp. 125.000.000. Rincian pagu anggaran dimaksud sebagai berikut:

Tabel 4
Pagu Anggaran Tahun 2016

No	Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi
	(1)	(2)	(3)
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional	Rp 501,598,000.	Rp 480,312,000.
2.	Penyusunan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional	Rp 63,338,000.	Rp 26,478,000.
3.	Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional	Rp 335,014,000.	Rp 269,160,000.
4.	Alokasi tambahan anggaran APBN-P TA 2016 (Blokir)	-	Rp 125,000,000.
	JUMLAH	Rp 900,000,000.	Rp 900,000,000.

C. Indikator Kinerja Utama

Uraian mengenai Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Hubungan Internasional adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam.	100%
2.	Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam.	100%
3.	Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam.	100%

Indikator Kinerja Utama 1

Indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen rekomendasi kebijakan, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

Indikator Kinerja Utama 2

Indikator persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen rekomendasi persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

Indikator Kinerja Utama 3

Indikator persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

BAB III

CAPAIAN KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan ini berbasis pada penilaian sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan kategori capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6
Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100%	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - <85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Sedang
5.	< 55%	Kurang Baik

B. Capaian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran capaian kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Dokumen Penetapan Kinerja Asdep Hubungan Internasional Tahun 2016 menetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai, yaitu “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional”, yang diukur dengan 6 (enam) indikator sasaran. Adapun realisasi dan capaian sasaran dan indikator sasaran pada tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 7
Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%
4.	Persentase rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
5.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%
6.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional secara tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata		100%	100%	100%

C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan tabel tersebut di atas, realisasi kinerja sasaran Asdep Bidang Hubungan Internasional memperoleh nilai rata-rata 100% (sangat baik) dan menghasilkan 612 (enam ratus dua belas) dokumen rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dan yang disusun secara tepat waktu (indikator sasaran 1 dan indikator sasaran 2) sejumlah 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) dokumen rekomendasi.
2. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dan yang disusun secara tepat waktu (indikator sasaran 3 dan indikator sasaran 4) sejumlah 101 (seratus satu) dokumen rekomendasi.

3. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam dan yang disusun secara tepat waktu waktu (indikator sasaran 5 dan indikator sasaran 6) sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) dokumen rekomendasi.

Dalam rangka memenuhi target sasaran, Asdep Bidang Hubungan Internasional menggunakan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. **'Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam' dan 'Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu', dengan target ditetapkan 100% berhasil mencapai realisasi 100% maka capaian sebesar 100% (sangat baik).**

1.1. Input Kegiatan

Sumberdaya dalam rangka pencapaian target indikator sasaran 1 dan indikator sasaran 2 terdiri dari 16 orang SDM, dokumen Standar Pelayanan, surat masuk serta alokasi anggaran sebesar Rp Rp 480,312,000.

1.2. Kegiatan-kegiatan yang mendukung

Rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional diantaranya terkait dengan laporan kunjungan kerja Menteri ke luar negeri, permohonan penyelesaian permasalahan baik berasal dari lembaga internasional /Kementerian/Lembaga dalam lingkup hubungan internasional, laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam lingkup hubungan internasional, dan Laporan tim advance terkait persiapan pelaksanaan dan pendahuluan suatu forum internasional yang akan dihadiri oleh Presiden.

Dalam penyusunan rekomendasi kebijakan tersebut, Asdep Bidang Hubungan Internasional melakukan berbagai kegiatan pendalaman substansi yang mengacu pada: (i) beberapa referensi, seperti buku, jurnal, media cetak dan internet, (ii) rapat koordinasi dengan instansi terkait di dalam dan luar negeri, (iii) pemantauan/kunjungan kerja dan berpartisipasi pada penyelenggaraan konferensi/seminar/FGD/ /diskusi terbatas di dalam dan luar negeri. Beberapa contoh kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

a. Menghadiri pertemuan atau rakor di dalam negeri, antara lain mengenai:

- **Usulan Kerja Sama Luar Negeri di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, dilaksanakan di Jakarta tanggal 22 April 2016, untuk membahas usulan rencana kerja sama luar negeri dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan antara Indonesia dengan Finlandia, Kenya, Korea Selatan, dan Timor Leste.
- **Rencana Pendirian Kantor Regional Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk kawasan Asia di Jakarta**, dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2016, untuk membahas langkah antisipasi atas usulan pendirian kantor dimaksud di Indonesia yang rencananya akan dibahas pada Pertemuan Tingkat Menteri OKI bulan Oktober 2016.
- **Rencana Pengembangan Pos Lintas Batas Negara/PLBN Entikong**, dilaksanakan di Jakarta tanggal 3 Agustus 2016, untuk membahas penambahan jalur kargo komersial di PLBN Entikong, dan mengumpulkan data terkait *site plan* dan *plotting* pemetaan pada peta MoU Perbatasan RI-Malaysia tahun 1976.
- **Penyusunan Posisi Delegasi RI pada Negotiating Group on Economic Cooperation Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement**, dilaksanakan di Jakarta tanggal 21 Oktober 2016, untuk membahas rencana kerja sama bilateral di bidang ekonomi, khususnya pada isu *capacity building*.
- **Mekanisme Monitoring Perjanjian Internasional**, dilaksanakan di Depok tanggal 1 dan 2 Desember 2016, untuk membahas mekanisme pengaturan implementasi monitoring perjanjian internasional.
- **Pembentukan Directory Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN**, dilaksanakan di Jakarta, untuk membahas rencana penguatan koordinasi diantara kementerian/lembaga terkait guna membahas isu-isu strategis politik dan keamanan di kawasan.
- **Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular II T.A. 2016**, dilaksanakan beberapa kali pada tahun 2016, untuk mengkonsolidasikan implementasi Kerja Sama Selatan-Selatan, khususnya mengenai kebutuhan adanya suatu *Single Agency* KSST di Indonesia.

b. Melakukan pemantauan arahan Presiden RI, antara lain mengenai:

- **Pembangunan Sarana Dan Prasarana K/L**, dilaksanakan di empat tempat yaitu Kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Makassar dan Mamuju (tanggal 11-13 Mei 2016), Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) di Padang Sidempuan dan Serdang Bedagai, Sumatera Utara serta Padang, Sumatera Barat (tanggal 9-13 Mei 2016), Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Provinsi Kalimantan Utara, Kantor Pengadilan Agama (PA) Atambua di Kabupaten Belu, NTT (tanggal 14-17 Juni 2016), untuk memperoleh informasi serta melakukan penilaian tingkat urgensi atas permohonan pembangunan gedung yang memerlukan izin Presiden RI.



- **Pemanfaatan Kerangka Kerja Sama ASEAN bagi Penanganan Bencana di Indonesia**, dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara, tanggal 11-13 Oktober 2016, untuk meninjau pelaksanaan Bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di Indonesia dan rangkaian pertemuan *ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) ke-29* sebagai upaya mewujudkan kebijakan strategis penanggulangan bencana.



- **Peningkatan Pelayanan Publik (BPKB, STNK, dan SIM)**, dilaksanakan di Depok, tanggal 22 s.d. 23 Desember 2016, untuk melaksanakan peninjauan lapangan terhadap pelayanan publik pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) dan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (samsat) POLRI.

c. Menghadiri pertemuan/konferensi di luar negeri, antara lain mengenai:

- **Pertemuan *The 13th ASEAN-Korea FTA Implementing Committee* dan Pertemuan Terkait Lainnya**, dilaksanakan di Seoul, Korea, tanggal 2-4 Februari 2016, yang membahas agenda pengesahan *legal enactment* (LE) untuk pengurangan tarif komitmen, definisi *Through Bill of Lading* (B/L) status *the 3rd Protocol to Amend the AK Trade in Goods Agreement*, dan rencana *upgrading the AK Trade in Goods Agreement* melalui liberalisasi produk *sensitive track* AKFTA.



- **Pertemuan *The 6th ASEAN-Hong Kong-China Trade Negotiation Committee* dan Pertemuan Terkait lainnya**, dilaksanakan di Siem Reap, Kamboja, tanggal 7-11 Maret 2016 dalam format Caucus (ASEAN) dan Plenary (ASEAN-Hong Kong), serta dilaksanakan secara *back-to-back* dengan pertemuan bilateral RI–Hong Kong dan pembahasan *Working Groups*.



- Pertemuan ***The 8th ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement Joint Committee and Related Meetings***, dilaksanakan di Melbourne, Australia, tanggal 13-18 Maret 2016, yang membahas perkembangan implementasi dari perjanjian AANZFTA dan upaya peningkatan hubungan melalui kerangka bilateral maupun AANZFTA.



- Pertemuan ***The 49th Session of UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group V*** mengenai ***“Insolvency Law”***, dilaksanakan di New York, Amerika Serikat, tanggal 2-6 Mei 2016, yang membahas draft UNCITRAL *Model Law on Cross-border Insolvency* (Pengaturan Kepailitan Lintas Negara) mengenai pengaturan kepailitan lintas negara yang melibatkan grup perusahaan multinasional, pengakuan dan penerapan putusan kepailitan lintas yurisdiksi dan kewajiban direksi grup perusahaan multinasional dalam periode menjelang pailit.



- **Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2016**, dilaksanakan di Hangzhou, Tiongkok, tanggal 4-5 September 2016, yang membahas isu-isu penting tentang *Strengthening Policy Coordination and Breaking a New Path for Growth, More Effective and Efficient Global Economic and Financial Governance, Robust International Trade and Investment*, dan *Inclusive and Interconnected Development*.



- **Pertemuan *The 5th Asia Pacific Alternative Dispute Resolutions (ADR) Conference***, dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan, tanggal 12-13 Oktober 2016, yang membahas perkembangan terbaru mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam dunia arbitrase internasional.



- **Rangkaian KTT Asia Pacific Economic Cooperation**, dilaksanakan di Lima, Peru, tanggal 19-20 November 2016 yang memiliki tema "*Quality Growth and Human Capital Development: Foundation for Sustainable Growth in the Asia Pacific*".



- **Rangkaian Sidang IMO Maritime Safety Committee (MSC) ke-97**, dilaksanakan di London, tanggal 21-25 November 2016 yang membahas *Drafting Group on Amendments to mandatory instruments, Working Group on Goal-based Standards, Working Group on Carriage of industrial personnel.*



d. Penyampaian rekomendasi yang menjadi topik ratas dan sidang kabinet, antara lain mengenai:

- **Percepatan Pembangunan di Natuna**, ratas dilaksanakan tanggal 23 Juni 2016 dan menghasilkan arahan mengenai pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan kawasan di Laut Cina Selatan, penghormatan terhadap *United Nations Convention on the Law of the Sea* dan hukum internasional dan menghindari kegiatan yang dapat meningkatkan ketegangan.
- **Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Organisasi-Organisasi Internasional**, ratas dilaksanakan tanggal 22 Desember 2016, yang menghasilkan arahan bahwa apabila dirasakan tidak bermanfaat maka pengkajian lanjutan terhadap keanggotaan Indonesia pada beberapa organisasi tidak perlu dilakukan dan agar diselesaikan di tingkat Menteri Koordinator.

e. Penyampaian arahan Presiden yang ditindaklanjuti melalui surat Sekretariat Kabinet kepada Kementerian/Lembaga terkait, antara lain mengenai:

- **Bantuan kemanusiaan Indonesia bagi korban bencana Topan Winston di Fiji**, yang disampaikan kepada Menlu RI melalui Surat Sekretaris Kabinet pada bulan Maret 2016.
- **Peningkatan kerja sama dengan Taiwan dalam Kerangka Kebijakan Satu Tiongkok**, yang disampaikan kepada Menlu melalui Surat Sekretaris Kabinet pada bulan Maret 2016 dan April 2016.
- **Penggantian biaya perawatan dan pengobatan Duta Besar LBBP RI untuk Kroasia, Almarhum Bapak Alexander Litaay**, yang disampaikan kepada Menlu melalui Surat Sekretaris Kabinet pada bulan Oktober 2016.
- **Penyelesaian dan mencari solusi terkait permasalahan EKONID di Indonesia**, yang disampaikan kepada Mendag melalui Surat Sekretaris Kabinet pada bulan November 2016
- **Rencana kerja sama platform e-commerce dengan Alibaba Group**, yang disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Surat Sekretaris Kabinet
- **Permohonan bantuan hibah Pemerintah RI kepada Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG)**, yang disampaikan kepada Menkeu melalui surat Surat Sekretaris Kabinet nomor: B.734/Seskab/Polhukam/12/2016 tanggal 15 Desember 2016.
- **Bahan masukan untuk Penyusunan Offering Memorandum dalam rangka Penerbitan Surat Utang Negara Valuta Asing (SUN Valas)**, yang disampaikan kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan melalui surat Wakil Sekretaris Kabinet, nomor: B.39/Waseskab/11/2016 tanggal 4 November 2016.
- **Evaluasi Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional**, yang disampaikan kepada Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri melalui Surat Deputi Bidang Polhukam nomor: B.811/Polhukam/09/2016 tanggal 23 September 2016.

1.3. Output/Outcome Kegiatan

Asdep Bidang HI berhasil menyiapkan dan menyampaikan 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) rekomendasi kebijakan bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Polhukam dan diselesaikan secara tepat waktu, dengan capaian indikator sasaran ini adalah 100% atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

2. **'Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam' dan 'Persentase rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu', dengan target ditetapkan 100% berhasil mencapai realisasi 100% maka capaian sebesar 100% (sangat baik).**

2.1. Input Kegiatan

Sumberdaya dalam rangka pencapaian target indikator sasaran 3 dan indikator sasaran 4 terdiri dari 16 orang SDM, dokumen Standar Pelayanan, surat masuk, serta alokasi anggaran sebesar Rp 26,478,000.

2.2. Kegiatan-kegiatan yang mendukung

Rekomendasi atas permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional didominasi hasil analisis permohonan izin prakarsa penyusunan pengesahan persetujuan kerjasama (ratifikasi) yang disampaikan kepada Presiden. Dalam penyusunan rekomendasi kebijakan tersebut, Asdep Bidang Hubungan Internasional terlibat dalam berbagai kegiatan serta berpartisipasi aktif dalam keanggotaan tim untuk proses ratifikasi dan pembahasan beberapa perjanjian internasional, antara lain:

a. Menghadiri pertemuan atau rapat koordinasi mengenai:

- **Ratifikasi Persetujuan Bilateral Hubungan Udara antara Indonesia-Rusia dan Indonesia-Australia**, dilaksanakan di Tangerang, tanggal 1 dan 2 Februari 2016, bertujuan untuk membahas, menyempurnakan dan berhasil menyepakati dokumen naskah penjelasan serta draf Rancangan Peraturan Presiden, yang akan diajukan untuk proses ratifikasi.

- **Ratifikasi Persetujuan Bebas Visa (PBV) bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas antara Indonesia dengan beberapa negara, yaitu: El Salvador, Lithuania, Rumania, Albania, Mesir, dan Italia,** dilaksanakan di Bandung, tanggal 10-13 Februari 2016, untuk membahas naskah penjelasan dan draf Rancangan Peraturan Presiden yang akan diajukan untuk proses ratifikasi.
- **Ratifikasi Perjanjian Hubungan Udara antara RI-Turki,** dilaksanakan di Tangerang, tanggal 20-22 Oktober 2016, untuk membahas Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur tentang angkutan udara sipil di Indonesia dan Republik Turki.
- **Pembahasan Naskah Terjemahan *Trade Agreement* antara Indonesia-Iran,** dilaksanakan di Jakarta, tanggal 20 Desember 2016, untuk membahas dan menyepakati naskah terjemahan *Agreement* kedalam Bahasa Indonesia yang sesuai dengan naskah asli *Agreement*. Hal ini dilakukan agar proses ratifikasi *Agreement* dapat dilanjutkan kembali.
- **Pembahasan Perpres Nomor 46 Tahun 2016 tentang *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia on the Privileges and Immunities of the Secretariat of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*,** untuk membahas dasar hukum bagi persetujuan mengenai Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat organisasi dimaksud yang telah ditandatangani pada tanggal 8 dan 13 Oktober 2014 di Jakarta.
- **Ratifikasi *Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window*,** untuk membahas proses ratifikasi *Protocol* yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada pertemuan *ASEAN Finance Minister's Meeting* pada tanggal 4 September 2015. Saat ini hanya Indonesia, Singapura, Laos, dan Kamboja yang belum meratifikasi.
- **Ratifikasi *The Final Acts of World Radiocommunication Conference (WRC) 2015*,** dilaksanakan beberapa kali pada tahun 2016, untuk melakukan penyusunan *timeline* prosedur ratifikasi, dan menargetkan akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden pada medio Tahun 2017.

- Ratifikasi *The Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat for the Implementation of ASEAN Institute for Peace and Reconciliation the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals*. Izin prakarsa Presiden terkait hal tersebut telah disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Menteri Luar Negeri melalui surat nomor: B.403/Polhukam/07/2016 tanggal 19 Juli 2016.
- Pembahasan Keppres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)*. *Terms of Reference of AIPR* telah disahkan pada tanggal 12 Juli 2012 di Phnom Penh, Kamboja.
- Pembahasan Akses *The Geneva Act (1999) of the Hague Agreement Concerning the International Registration of the Industrial Designs*. Tujuan pendaftaran internasional desain industri melalui *the Hague Agreement* adalah untuk memberikan perlindungan di wilayah negara anggota melalui satu permohonan yang diajukan ke *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.
- Ratifikasi *Memorandum of Cooperation Between the Governments of the Member States of the ASEAN and the Governments of the People's Republic of China, Japan, and the Republic of Korea on Strengthening Tourism Cooperation*, dilaksanakan di Jakarta, mencatat bahwa Memorandum dimaksud telah ditandatangani oleh negara anggota pada tanggal 22 Januari 2016 dan bertujuan untuk memperkuat, memperluas, dan memperdalam kerja sama bidang pariwisata antar negara anggota *ASEAN Plus Three*.
- Ratifikasi *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)*, dilaksanakan di Jakarta, untuk membahas proses ratifikasi Perjanjian dimaksud yang telah ditandatangani tanggal 1 Agustus 2016 di Jakarta dan merupakan kelanjutan dari *Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries* yang sebelumnya telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 42 Tahun 2016.

- Ratifikasi ***Article 3 Bis Chicago Convention*** bagi Indonesia sebagai **Anggota Komunitas Internasional**, dilaksanakan di Surabaya, tanggal 1-3 Mei 2016, untuk menindaklanjuti rencana Indonesia untuk melakukan ratifikasi *Article 3* dimaksud, yang merupakan amandemen dari Chicago Convention yang disahkan pada tanggal 10 Mei 1984 di Montreal, Kanada.
 - Ratifikasi ***The Establishment of ASEAN Centre for Biodiversity, The Establishment of ASEAN Forest Cooperation Organization, dan Host Country Agreement of International Union for Conservation of Nature (AFoCO)***, dilaksanakan di Yogyakarta, tanggal 25-26 April 2016, untuk membahas tindak lanjut proses ratifikasi/penyusunan dasar hukum keanggotaan pada ACB, permohonan izin prakarsa HCA-IUCN, dan pembahasan teks *Agreement* pembentukan AFoCO.
 - Ratifikasi ***Final Acts of the World Conference on International Telecommunications, Dubai, 2012***, untuk membahas RPerpres pengesahan *Final Acts* dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi internasional antara Indonesia dengan anggota ITU lainnya.
- b. Penyampaian rekomendasi yang ditindaklanjuti melalui surat Sekretariat Kabinet kepada Kementerian/Lembaga terkait, antara lain mengenai:
- RPerpres tentang Pengesahan ***Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat for the Implementation of the ASEAN Mutual Recognition Agreement on Tourism Professionals***, yang disampaikan kepada Menlu melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.403/Polhukam/07/2016 tanggal 19 Juli 2016
 - Permohonan untuk mendapatkan informasi komprehensif perkembangan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang disampaikan kepada Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri dan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan melalui surat Deputi Bidang Polhukam nomor: B.855/Polhukam/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

2.3. Output/Outcome Kegiatan

Asdep Bidang HI berhasil menyiapkan dan menyampaikan 101 (seratus satu) dokumen rekomendasi terkait permohonan persetujuan prakarsa dan substansi rancangan PUU bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dan diselesaikan secara tepat waktu, dengan capaian indikator sasaran ini adalah 100% atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

3. **'Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam' dan Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu, dengan target ditetapkan 100% berhasil mencapai realisasi 100% maka capaian sebesar 100% (sangat baik).**

3.1. Input Kegiatan

Sumberdaya dalam rangka pencapaian target indikator sasaran 5 dan indikator sasaran 5 terdiri dari 16 orang SDM, dokumen Standar Pelayanan, surat masuk, serta alokasi anggaran sebesar Rp 269,160,000.

3.2. Kegiatan-kegiatan yang mendukung

Kegiatan penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional dilaksanakan diantaranya melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian dalam rangka mempersiapkan materi substansi bagi Presiden atau Sekretaris Kabinet dalam menerima tamu kenegaraan atau duta besar negara sahabat, serta beberapa permintaan untuk menyiapkan surat jawaban dari luar negeri, antara lain:

a. Menghadiri pertemuan atau rapat koordinasi, antara lain mengenai:

- **Persiapan Rangkaian Kunjungan Presiden RI ke Eropa tanggal 17-23 April 2016**, dilaksanakan di Jakarta, tanggal 1 April 2016, untuk membahas persiapan hal-hal teknis dan substansi untuk kunjungan Presiden RI ke Eropa, yang meliputi: Jerman, Inggris, Belgia dan Belanda.

- **Persiapan Kunjungan Menteri Luar Negeri Austria ke Indonesia tanggal 2-3 Mei 2016**, dilaksanakan di Jakarta, tanggal 19 April 2016, untuk membahas rencana program Menlu Austria selama berada di Indonesia, dan persiapan substansi untuk menyiapkan bahan talking points Presiden RI dalam menerima Courtesy Call Menlu Austria.
 - **Persiapan Kunjungan Presiden Filipina ke Indonesia**, dilaksanakan di Jakarta, tanggal 1 September 2016, untuk membahas usulan substansi talking points Presiden RI dalam melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina.
 - **Penyusunan Alternatif Program Tambahan bagi Kunjungan Presiden RI ke Australia bulan November 2016**, dilaksanakan di Jakarta, tanggal 7 September 2016, untuk membahas usulan program-program kegiatan tambahan/side events dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Australia, termasuk kegiatan blusukan Aussie style, yang akan diajukan kepada Pemerintah Australia.
 - **Rencana Kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia pada tanggal 5-7 Oktober 2016**, dilaksanakan di Bogor, tanggal 30 September 2016, untuk membahas usulan jadwal Kunjungan Raja Arab Saudi, Raja Salman, ke Indonesia pada tanggal 5-7 Oktober 2016 yang belum memperoleh konfirmasi dari Kerajaan Arab Saudi hingga mendekati waktu pelaksanaan.
 - **Rencana Kunjungan Kerja PM Singapura beserta Istri ke Semarang dan Kendal pada tanggal 13-14 November 2016**, untuk membahas jadwal kunjungan kerja dan agenda penandatanganan MoU on Tourism yang dilaksanakan di Semarang.
- b. Penyampaian arahan Presiden yang ditindaklanjuti melalui surat Sekretariat Kabinet kepada K/L terkait, antara lain mengenai:
- **Penundaan kunjungan Presiden Republik Lithuania ke Indonesia menjadi bulan Januari 2017**, yang disampaikan kepada Menlu melalui surat Sekretaris Kabinet pada bulan April 2016.

- **Undangan kepada Presiden RI untuk melakukan kunjungan ke India**, yang disampaikan kepada Menlu melalui surat Sekretaris Kabinet pada bulan April 2016.
- **Tindak lanjut hasil-hasil kunjungan Presiden RI ke Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia (Uni Eropa) tanggal 17-23 April 2016**, yang disampaikan kepada Menteri terkait melalui surat Sekretaris Kabinet pada bulan April 2016.
- **Rencana kunjungan Perdana Menteri Singapura ke Indonesia, tanggal 24-26 Agustus 2016**, yang disampaikan kepada Menlu melalui surat Sekretaris Kabinet pada bulan Juni 2016.
- **Tindak lanjut hasil kunjungan Presiden ke Republik Korea dan Rusia, tanggal 15-20 Mei 2016**, yang disampaikan kepada Menteri terkait melalui surat Sekretaris pada bulan Juni 2016.
- **Rencana kunjungan PM Singapura ke Indonesia**, yang disampaikan kepada Menlu melalui surat Sekretaris Kabinet pada bulan Agustus 2016.
- **Pendelegasian kehadiran Presiden RI pada KTT *Asia Cooperation Dialogue (ACD)* ke-2 di Bangkok, tanggal 9-10 Oktober 2016**, yang disampaikan kepada Menko Bidang Perekonomian melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.559/Seskab/Polhukam/10/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

3.3. Output/Outcome Kegiatan

Asdep Bidang HI berhasil menyiapkan dan menyampaikan 133 (seratus tiga puluh tiga) dokumen rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang hubungan internasional dan diselesaikan secara tepat waktu, dengan capaian indikator sasaran ini adalah 100% atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

D. Realisasi Anggaran Tahun 2016

Capaian kinerja Asdep Bidang Hubungan Internasional tahun 2016 didukung oleh pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp 775.000.000 (terdapat pengurangan senilai Rp. 125.000.000. dari pagu anggaran awal sebesar Rp. 900.000.000). Asdep Bidang Hubungan Internasional berhasil **merealisasikan anggaran sebesar Rp 774.932.619 yang merupakan capaian senilai 99,99%** dari pagu anggaran revisi sebesar Rp. 775.000.000. atau senilai 86,21% dari pagu anggaran awal sebesar Rp. 900.000.000.

Tabel 8
Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2016

No	Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	Capaian
	(1)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional	Rp 480,312,000.	Rp 480,245,085.	99,98%
2.	Penyusunan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional	Rp 26,478,000.	Rp 26,477,534.	99,99%
3.	Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional	Rp 268,210,000.	Rp 268,210,000.	100%
	Capaian Pagu Revisi	Rp 775,000,000.	Rp 774.932.619.	99,99%
	Blokir Anggaran	Rp 125,000,000.		
	Capaian Pagu Awal	Rp 900,000,000.	Rp 774.932.619.	68,21%

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Simpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi Output

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah menghasilkan 612 (enam ratus dua belas) dokumen rekomendasi di bidang hubungan internasional, yang terdiri dari 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) rekomendasi kebijakan, 101 (seratus satu) rekomendasi atas permohonan persetujuan prakarsa dan substansi RPUU, dan 133 (seratus tiga puluh tiga) rekomendasi terkait materi sidang kabinet yang keseluruhannya ditindaklanjuti oleh Deputi dan disusun secara tepat waktu (**capaian 100% kategori sangat baik**), rekomendasi tersebut dihasilkan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi dengan instansi terkait serta menghadiri pertemuan dan konferensi yang diselenggarakan di dalam dan di luar negeri.

2. Dari Segi Anggaran

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah merealisasikan anggaran tahun 2016 sebesar **Rp 774.932.619** yang merupakan capaian senilai **99,99%** dari pagu anggaran revisi sebesar Rp. 775.000.000. atau senilai 86,21% dari pagu anggaran awal sebesar Rp. 900.000.000.

B. Langkah-Langkah Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja

Sepanjang Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah dapat memperlihatkan kinerjanya untuk memenuhi indikator sasaran dan menyerap anggaran yang cukup memuaskan. Agar keberhasilan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan perlu berbagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti:

1. meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya.
2. memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.
3. mengikutsertakan dalam keanggotaan Tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi akuntabilitas Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional serta dapat menjadi masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.